

TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DAN MEKANISME EKSEKUSI PERKARA SENGKETA TANAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA)

Anisa Miftahul Firdaus¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

INTISARI

Konflik pertanahan merupakan persoalan kompleks dengan dampak sosial dan ekonomi signifikan. Tanah sebagai objek strategis kerap menjadi sengketa karena ketidaksesuaian administrasi, tumpang tindih kepemilikan, dan lemahnya eksekusi putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji aspek hukum serta mekanisme pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara di Pengadilan Negeri Palangkaraya, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Palangkaraya menghadapi kendala struktural dan kultural. Dari total permohonan eksekusi sengketa tanah tahun 2024–2025, hanya sebagian kecil berhasil dilaksanakan. Hambatan utama meliputi ketidakpatuhan pihak tereksekusi, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan minimnya profesionalitas pelaksanaan teknis.

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun regulasi tersedia, pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah belum optimal. Diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat penegak hukum, serta peningkatan integritas dan kapasitas SDM untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Kata Kunci: *Eksekusi Sengketa Tanah, Hambatan Eksekusi, Pengadilan negeri*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DAN MEKANISME EKSEKUSI PERKARA SENGKETA TANAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA)

ABSTRACT

Anisa Miftahul Firdaus¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

Significant economic implications. Land, as a strategic asset, is often subject to disputes due to administrative inconsistencies, overlapping ownership claims, and weak enforcement of court decisions. This study examines the legal aspects and execution mechanisms of land dispute case enforcement at the Palangkaraya District Court.

This research employs a normative-empirical method using a statutory and case approach. Data were collected through literature review and interviews at the Palangkaraya District Court, then analyzed using a descriptive-qualitative approach.

The findings indicate that the execution of land dispute cases at the Palangkaraya District Court faces both structural and cultural challenges. Of the total land dispute execution requests in 2024–2025, only a small portion have been successfully implemented. Major obstacles include non-compliance by the judgment debtor, lack of inter-agency coordination, and low professionalism in technical execution.

The conclusion of this study emphasizes that despite the availability of regulations, the execution of land dispute cases remains suboptimal. Strengthening coordination among the judiciary, the National Land Agency, and law enforcement, along with improving the integrity and capacity of human resources, is essential to ensure legal certainty for justice seekers.

Keyword: : Land Dispute Execution, Execution Obstacles, District Court

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta